



Kemendikdasmen

**Rencana Aksi
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Tahun 2026**

A. Rencana Target dan Anggaran

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi Anggaran
			I	II	III	IV	
[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan							
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang menerapkan upaya pencegahan korupsi dan anti kekerasan secara konsisten	Persen	40	0	0	0	40	Rp4.358.103.000
WA.7594.EBA.001 Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	Dokumen	3	0	0	0	3	Rp4.358.103.000
[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal							
[IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	74	0	0	24	74	Rp3.140.958.000
WA.7594.EBA.002 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Laporan	6	0	0	0	6	Rp3.140.958.000
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal							
[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95.5	0	0	0	95.5	Rp10.550.505.000
WA.7594.EBA.962 Layanan Umum	Dokumen	20	1	1	1	17	Rp4.709.052.000

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi Anggaran
			I	II	III	IV	
WA.7594.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	4	0	0	0	4	Rp1.621.453.000
WA.7594.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	7	0	0	4	3	Rp1.680.000.000
WA.7594.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	0	1	1	3	Rp2.540.000.000
[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	100	0	0	0	100	Rp56.680.406.000
WA.7594.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	24	6	6	6	6	Rp51.690.216.000
WA.7594.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Paket	10	0	5	5	0	Rp4.990.190.000
WA.7594.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	-	0					-
[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	Persen	40	0	0	0	40	Rp4.680.118.000
WA.7594.EBA.956 Layanan BMN	Dokumen	1	0	0	1	0	Rp480.000.000
WA.7594.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	10	0	0	5	5	Rp1.492.013.000
WA.7594.EBC.001 Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Orang	182	25	30	30	97	Rp1.845.905.000
WA.7594.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Orang	182	25	30	30	97	Rp509.600.000
WA.7594.FAB.001 Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Itjen	Sistem Informasi	1	0	0	0	1	Rp352.600.000
Total Anggaran							Rp79.410.090.000

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. Rencana Kegiatan/Aktivitas

[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan

[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang menerapkan upaya pencegahan korupsi dan anti kekerasan secara konsisten

• Triwulan I

1. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan
2. Perencanaan program fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

• Triwulan II

1. Penetapan sasaran pelaksanaan program fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan
2. Sosialisasi program fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

• Triwulan III

Pelaksanaan program fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

• Triwulan IV

1. Pelaksanaan program fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan
2. Evaluasi pelaksanaan program fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan
3. Penyusunan laporan akhir program fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal

[IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

• Triwulan I

Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja tindak lanjut tahun 2026

• Triwulan II

Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI

• Triwulan III

Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI

• Triwulan IV

1. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI
2. Melaksanakan asistensi untuk satker terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal

[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

• Triwulan I

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. Pembentukan pejabat perbendaharaan
2. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA
3. Sosialisasi internal terkait indikator IKPA
4. Penetapan target capaian output tahun 2026
5. Penetapan besaran Uang Persediaan (UP)

• **Triwulan II**

1. Melakukan revisi Halaman III DIPA dan Pemutakhiran DIPA
2. Penginputan target capaian output bulanan triwulan I dan triwulan II
3. Melakukan rekonsiliasi SAI
4. Melakukan koordinasi antara PPK, BP, dan BPP terkait pengelolaan UP/TUP

• **Triwulan III**

1. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA
2. Penginputan target capaian output bulanan triwulan III
3. Melakukan rekonsiliasi SAI
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi nilai IKPA tahun 2026
5. Melakukan optimalisasi nilai IKPA tahun 2026

• **Triwulan IV**

1. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA
2. Penginputan target capaian output bulanan triwulan IV
3. Melakukan rekonsiliasi SAI
4. Melakukan koordinasi antara PPK, BP, dan BPP terkait pengelolaan UP/TUP
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi nilai IKPA tahun 2026

[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

• **Triwulan I**

1. Melakukan penyusunan rencana kerja serta penyesuaian RKA-K/L
2. Melakukan penentuan RO SBKK dan RO SBKU

• **Triwulan II**

1. Melakukan monitoring realisasi capaian output
2. Melakukan monitoring penggunaan RO SBKK dan RO SBKU

• **Triwulan III**

1. Melakukan monitoring realisasi capaian output
2. Melakukan monitoring penggunaan RO SBKK dan RO SBKU

• **Triwulan IV**

1. Melakukan monitoring realisasi capaian output
2. Melakukan monitoring penggunaan RO SBKK dan RO SBKU
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi nilai EKA tahun 2026

[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA

• **Triwulan I**

1. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025
2. Melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026
3. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi SAKIP tahun 2025
4. Melaksanakan revaluasi kinerja atas capaian tahun 2025 sebagai dasar penyusunan perjanjian

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

kinerja tahun 2026

• **Triwulan II**

1. Melakukan penyusunan rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun 2026
2. Melakukan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2026
3. Membuat kertas kerja evaluasi (KKE) SAKIP tahun 2026
4. Membuat pedoman evaluasi AKIP tahun 2026

• **Triwulan III**

1. Melakukan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2026
2. Melakukan pengumpulan data dukung SAKIP 2026
3. Melakukan reviu pedoman evaluasi AKIP 2026
4. Melakukan sosialisasi pedoman evaluasi AKIP 2026
5. Melakukan evaluasi mandiri dan pengisian kertas kerja evaluasi AKIP 2026

• **Triwulan IV**

1. Melakukan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2026
2. Melakukan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2026
3. Melakukan proses sanggah evaluasi AKIP tahun 2026
4. Melakukan penyusunan draf Laporan Kinerja Tahun 2026

Jakarta, 30 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal
Ferdian Amran

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR